

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan yang mampu menjamin ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga, serta menjamin konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang ditingkat rumah tangga sepanjang waktu, melalui pemanfaatan sumber daya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang besar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan (Priambodo, 2019).

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019). Konsumsi pangan dengan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor penting untuk menentukan tingkat kesehatan dan tingkat kecukupan konsumsi pangan dan gizi seseorang akan

mempengaruhi keseimbangan perkembangan jasmani dan rohani yang bersangkutan untuk mempertahankan ketahanan pangan.

Dalam Rancangan Aksi Nasional Pangan Dan Gizi (RAN-PG) pada tahun 2015-2019 menargetkan Skor PPH pada tahun 2019 yaitu sebesar 92,5. Dan skor PPH ideal adalah 100 yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila memiliki skor PPH sebesar 100 (Badan Ketahanan Pangan , 2015). Konsumsi pangan penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 2013-2018 PPH dengan AKE 2.150 kkal/kap/hari yaitu tahun 2013 sebesar 80,2, 2014 sebesar 82,1, 2015 sebesar 85,8, 2016 sebesar 87,4, 2017 sebesar 88,0 dan 2018 sebesar 89,6. Sedangkan untuk penduduk pedesaan di Indonesia yaitu tahun 2013 sebesar 75,2, 2014 sebesar 77,0, 2015 sebesar 76,7, 2016 sebesar 76,7, 2017 sebesar 83,7 dan 2018 sebesar 82,5. (sumber: susenas 2013-2018; BPS diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP).

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk perkotaan dan pedesaan di Indonesia pada tahun 2013 – 2018 skor PPH masih dibawah skor ideal. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama (Badan Ketahanan Pangan , 2015). Pengelompokan pangan terbagi menjadi sembilan, yaitu kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah, biji berminyak, lemak dan minyak, gula, serta makanan lainnya, bahan pangan dikelompokkan menjadi sembilan golongan pangan dalam menentukan PPH.

Pengelompokan pangan ini didasarkan pada sisi kualitas dan kuantitas (Par'i, 2016).

Menurut Nugayasa 2013 dalam (Par'i, 2016) Ketersediaan pangan sepanjang waktu dalam jumlah yang cukup dan terjangkau, sangat menentukan tingkat konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Pola konsumsi masyarakat pada masing-masing daerah berbeda-beda, tergantung dari potensi daerah dan struktur budaya masyarakat. Pola konsumsi masyarakat Indonesia masih didominasi oleh padi-padian, khususnya beras. Masyarakat umumnya mempunyai ketergantungan yang kuat terhadap beras sebagai sumber karbohidrat (Suyastiri Y.P, 2008).

Berdasarkan hasil analisis konsumsi pangan pada tahun 2016, kualitas konsumsi pangan masyarakat Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan oleh skor pola pangan harapan, sudah cukup baik meskipun belum mencapai skor ideal. Skor PPH Jawa Barat mengalami kenaikan dalam tiga tahun. Pada tahun 2014 skor PPH sebesar 78,3. Pada tahun 2015 sebesar 81 dan pada tahun 2016 sebesar 84,3. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan konsumsi energi dari tahun 2014 sebesar 2010,9 kkal/kapita/hari menjadi 2165,3 kkal/kapita/hari di tahun 2015, sedangkan tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 2260 kkal/kapita/hari. Namun secara kualitas kontribusi Angka Kecukupan Energi ini masih didominasi oleh kelompok padi-padian sebesar 62,8%, tingginya kontribusi AKE padi-padian ini salah satunya disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi oleh beras (Dinas Ketahanan Pangan , 2021).

Pemenuhan kebutuhan pangan seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Konsumsi pangan yang beragam sangat penting

karena tubuh memerlukan 45 jenis zat gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman (Badan Ketahanan Pangan , 2015 ). Jika konsumsi pangan penduduk berdasarkan skor PPH masih dibawah skor ideal akan berdampak terhadap keadaan gizi rakyat, dimana dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan jasmani dan rohani bangsa. Timbulnya masalah gizi disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan distribusi pangan di satu bagian, dan dibagian lain pertambahan penduduk yang begitu pesat serta tingkat penghasilan yang relatif rendah, menurut Tarwotjo,dkk.,1979 dalam (Purnadhibrata, et al., 2019). Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional (Purwaningsih , 2008).

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman pangan dari berbagai kelompok pangan yang sesuai dengan pola pangan harapan. Dengan PPH sebagai acuan diharapkan dapat untuk meningkatkan mutu gizi konsumsi pangan dan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan pada salah satu jenis atau kelompok pangan. Skor PPH maksimal adalah 100 dimana semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk (Badan Ketahanan Pangan , 2019). Dengan terpenuhinya kebutuhan energi dari berbagai pangan sesuai dengan PPH maka secara implisit kebutuhan zat gizi lainnya juga akan terpenuhi (Budiono & Pangesti, 2017).

Berdasarkan uraian tentang hasil skor pola pangan harapan penduduk Indonesia dan permasalahan yang menyertainya maka, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan topik pembahasan mengenai mutu konsumsi pangan penduduk kabupaten/kota berdasarkan skor pola pangan harapan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mutu konsumsi pangan penduduk kabupaten/kota.

## **C. Tujuan**

### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui mutu konsumsi pangan penduduk kabupaten/kota.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi skor PPH konsumsi pangan penduduk kabupaten/kota.
- b. Mengidentifikasi bahan makanan yang berkontribusi melebihi skor maksimal PPH konsumsi pangan penduduk kabupaten/kota.
- c. Mengidentifikasi bahan makanan yang berkontribusi kurang dari skor maksimal PPH konsumsi pangan penduduk kabupaten/kota.

## **D. Manfaat**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi atau literatur dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penelitian tentang mutu konsumsi pangan penduduk kabupaten/kota.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dan pembaca tentang pentingnya memperhatikan mutu konsumsi pangan agar dapat diterapkan oleh seluruh kalangan masyarakat.